

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia memiliki beragam potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mengikuti perkembangan dunia serta ekonomi. Potensi-potensi yang di miliki oleh negara Indonesia haruslah dikelola dengan baik dan maksimal guna memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan rakyat. Dalam dunia usaha dan perindustrian Indonesia banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan pemerintah selama ini dipandang mampu mendorong terciptanya produktifitas serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai suatu negara yang sedang berkembang Indonesia tentu menghadapi tantangan yang cukup besar terkait persaingan dengan negara-negara lain dalam sektor bisnis dan perindustrian. Persaingan ini mau tidak mau harus dihadapi dan disikapi dengan baik oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membuat setiap kebijakan yang berhubungan dengan bisnis dan industri. Dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan sektor bisnis dan industri di Indonesia. Pembangunan Nasional memiliki kaitan erat dengan masalah kependudukan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja

yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja terlebih untuk negara yang sedang berkembang terutama Negara Indonesia dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat yaitu pertama, pertumbuhan penduduk dinegara berkembang cenderung tinggi sehingga melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi lebih muda sehingga lebih banyak penduduk yang masuk lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang cenderung mempunyai deversifikasi kegiatan ekonomi rendah serta keterampilan penduduk belum memadai membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks. Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumsi hasil pembangunan itu sendiri, dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan. Kondisi perkembangan tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan, banyak orang yang bekerja semata-mata dengan berbagai macam tujuan, namun yang menjadi tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi masih terdapat pula masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang tidak menunjang diantaranya strata pendidikan yang tidak sesuai harapan perusahaan atau instansi yang ada, dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala seperti perkembangan jumlah angkatan kerja namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup dan

membuat partisipasi angkatan kerja menurun. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang berkerja di berbagai sektor. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.(Kadek Borgan Bonerr,dkk,2018)

Kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas merupakan keniscayaan yang sangat berpengaruh pada maju tidaknya dunia industri. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai sehingga perusahaan dapat memperoleh dampak positif dari tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja harus memiliki riwayat pendidikan yang memadai baik formal maupun informal. Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh perusahaan yaitu terbatasnya tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang baik dan memiliki keterampilan. Kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para tenaga kerja harus sesuai dengan bidang tempat ia bekerja.

Tersedianya kesempatan kerja dalam menyerap tenaga kerja merupakan suatu masalah utama dalam pembangunan di Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Barat, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Saat ini peluang kerja semakin sedikit dan sulit untuk dicari, apalagi dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan tingginya angka pengangguran menjadikan kesempatan kerja menjadi berkurang. Tidak hanya itu saja yang menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja, tetapi juga kondisi perekonomian dan sektor industri yang tidak stabil pula memberi pengaruh sehingga masalah tersebut belum dapat diatasi. Pertumbuhan

penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat tentu saja kemudian akan meningkatkan jumlah angkatan kerja sementara lapangan kerja yang tersedia untuk menampung mereka belum memadai. Berikut merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
	Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	77,95	75,00	83,10	81,65	82,57
Kab. Pesisir Selatan	64,03	66,63	68,82	65,00	66,59
Kab. Solok	67,50	68,35	70,83	74,64	71,21
Kab. Sijunjung	68,21	68,43	70,17	70,70	70,06
Kab. Tanah Datar	66,51	69,03	69,25	69,42	66,88
Kab. Padang Pariaman	64,12	65,56	63,23	67,18	64,64
Kab. Agam	66,07	68,56	69,59	70,29	66,49
Kab. Lima Puluh Kota	72,63	73,10	73,28	72,71	71,33
Kab. Pasaman	70,63	67,20	70,91	72,97	69,35
Kab. Solok Selatan	69,19	74,89	72,56	72,67	72,11
Kab. Dharmasraya	64,53	68,56	70,49	72,72	73,04
Kab. Pasaman Barat	68,63	66,96	65,76	67,47	66,93
Kota Padang	61,15	62,78	61,98	64,31	63,78
Kota Solok	66,29	64,76	62,51	66,77	66,51
Kota Sawahlunto	70,44	72,88	69,83	70,57	68,05
Kota Padang Panjang	64,17	66,17	69,05	69,81	65,94
Kota Bukittinggi	65,23	69,15	65,55	69,84	67,42
Kota Payakumbuh	71,42	70,81	68,76	68,68	71,73
Kota Pariaman	65,20	67,00	69,36	64,16	62,70
Provinsi Sumatera Barat	66,29	67,56	67,88	69,01	67,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

Dari tabel 1.1 di atas tampak bahwa tingkat angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 tingkat

partisipasi angkatan kerja sebesar 66,29 persen, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 67,56 persen. Campaign pada tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,88 persen. Sementara pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,01 persen. Dan pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,72 persen. Angka tersebut menunjukkan keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan.

Pada hakikatnya Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, pembangunan potensi diri. Menurut Nuansa Aulia (2008) pendidikan diharapkan memperkuat keutuhan bangsa dalam NKRI, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Pelaksanaan pendidikan dasar dua belas tahun merupakan salah satu cara untuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan dunia kerja khusus di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan pengetahuan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih lamanya menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah pekerja mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka semakin tinggi produktivitas dan ekonomi nasional akan bertumbuh dengan baik. Untuk itu penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah berbaur dalam lingkungan pekerjaan (Kadek Borgan Bonerri,2018). Dan untuk tingkat pendidikan yang ada di

Sumatera Barat dapat dilihat dalam tabel 1.2 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Pada Jenjang Universitas Di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.2
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Pada Jenjang Universitas
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	100	100	192	175	131
Kab. Pesisir Selatan	1.761	1.961	2.223	3.753	1.788
Kab. Solok	1.104	2.489	1.250	1.014	645
Kab. Sijunjung	191	526	219	1.321	287
Kab. Tanah Datar	750	1.529	1.777	2.451	1.383
Kab. Padang Pariaman	599	396	1.804	1.928	1.624
Kab. Agam	1.032	1.836	2.324	2.327	1.965
Kab. Lima Puluh Kota	267	1.169	501	1.456	585
Kab. Pasaman	2.038	1.340	2.022	1.544	998
Kab. Solok Selatan	181	739	678	262	389
Kab. Dharmasraya	175	1.649	449	2.553	538
Kab. Pasaman Barat	1.001	1.718	1.069	379	1.045
Kota Padang	5.455	9.954	10.474	17.491	14.317
Kota Solok	474	392	373	443	213
Kota Sawahlunto	304	158	364	314	425
Kota Padang Panjang	149	315	267	414	379
Kota Bukittinggi	1.333	401	1.135	1.320	719
Kota Payakumbuh	778	1.158	276	598	796
Kota Pariaman	793	359	375	408	495
Provinsi Sumatera Barat	18.385	28.089	27.772	40.151	28.722

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada jenjang universitas menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2017 dan 2018 jumlah yang ditamatkan sama, untuk tahun 2019 tamatan yang paling banyak di Kota Padang dan paling sedikit Kepulauan Mentawai. Untuk tahun 2020 tamatan yang paling

banyak di kotadan yang paling sedikit di Kepulauan Mentawai. Dan yang terakhir di tahun 2021 tamatan yang paling tinggi di Kota Padang dan yang paling sedikit di Kepulauan Mentawai. Pendapatan adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan. Menurut Giang pendapatan yaitu akhir dari setiap keinginan dari setiap bekerja, sebab dari pendapatan seseorang dapat melangsungkan kehidupannya bersama keluarganya. Definisi pendapatan berbeda dengan definisi pendapatan rumah tangga. Berikut data Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021.

Tabel 1.3
Pendapatan Perkapita Sumatera Barat Tahun 2017-2021
(juta rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kepulauan Mentawai	46.104.85	47.058.57	50.124.57	53.187.51	54.801.09
Pesisir Selatan	27.383.18	28.316.76	30.115.10	28.040.42	29.291.69
Kab.Solok	32.492.96	34.097.79	36.207.85	34.619.89	35.715.31
Sijunjung	34.671.41	36.309.22	38.152.60	38.995.47	40.312.05
Tanah Datar	33.528.92	35.125.43	37.530.10	35.115.62	36.307.36
Padang Pariaman	46.671.21	49.454.88	50.951.83	41.723.04	42.619.68
Agam	37.622.18	39.240.35	41.609.17	38.625.89	39.961.30
Lima Puluh Kota	36.651.19	38.273.91	40.605.55	40.594.76	41.991.67
Pasaman	29.042.70	29.872.04	31.469.32	30.021.57	31.122.26
Solok Selatan	30.112.59	30.965.02	32.249.50	30.541.37	31.256.98
Dharmasraya	39.419.94	40.144.06	41.175.90	44.992.47	46.521.95
Pasaman Barat	32.923.97	33.523.36	34.315.25	35.460.71	36.514.79
Padang	58.110.15	61.235.34	65.134.22	68.509.35	71.355.43
Kota Solok	51.815.36	53.431.79	56.475.30	55.292.97	57.096.14
Sawahlunto	52.342.19	55.002.08	58.615.94	56.292.49	58.621.92
Padang Panjang	57.761.28	60.347.06	64.189.47	61.920.25	64.087.31
Bukittinggi	58.776.59	62.205.90	65.897.07	71.391.02	74.238.94
Payakumbuh	43.676.02	45.883.04	49.878.09	49.080.51	51.640.77
Pariaman	50.644.99	52.675.53	56.123.00	53.202.80	55.183.51
SUMATERA BARAT	40.193.61	42.802.66	44.885.51	43.843.67	45.293.75

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

Tabel 1.3 dapat dilihat pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 pendapatan perkapita yang rendah terdapat di pesisir selatan dan yang paling tertinggi terdapat kota bukittinggi. Di tahun 2018 pendapatan perkapita yang rendah terdapat di pesisir selatan dan yang paling tinggi terdapat di kota bukittinggi. Namun pada tahun 2019 pendapatan perkapita yang paling rendah terdapat pada kabupaten pesisir selatan dan yang paling tinggi terdapat pada Kota Bukittinggi. Pada tahun 2020 dan 2021 pendapatan perkapita yang rendah terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan yang paling tinggi terdapat pada Kota Bukittinggi. Dilihat dari uraian di atas pendapatan perkapita yang paling tinggi dari 5 tahun terakhir yaitu Kota Bukittinggi dikarenakan struktur perekonomiannya didukung oleh sektor perdagangan.

Rata-rata tanggungan sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. begitu juga sebaliknya semakin sedikit tanggungan keluarga maka semakin sedikit pula jumlah kebutuhan yang harus di penuhi. Rata-rata tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur yaitu bila pengurus kebutuhan sehari – hari dikelola bersama – sama menjadi satu. Jadi disimpulkan dalam hal ini jumlah anggota keluarga merupakan yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari karena belum bekerja (umur dalam non produktif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua). Berikut data Rata-rata tanggungan keluarga pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2017-2021 pada tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Rata-rata Tanggungan Sumatera Barat Tahun
2017-2021 (orang)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kepulauan Mentawai	4	4	4	4	4
Pesisir Selatan	4	4	4	4	4
Kab.Solok	4	4	4	4	4
Sijunjung	4	4	4	4	4
Tanah Datar	3	3	3	3	3
Padang Pariaman	4	4	4	4	4
Agam	4	4	4	4	4
Lima Puluh Kota	3	3	3	3	3
Pasaman	4	4	4	4	4
Solok Selatan	4	4	4	4	4
Dharmasraya	4	4	4	4	4
Pasaman Barat	4	4	4	4	4
Padang	4	4	4	4	4
Kota Solok	4	4	4	4	4
Sawah lunto	4	4	4	4	4
Padang Panjang	4	4	4	4	4
Bukittinggi	4	4	4	4	4
Payakumbuh	4	4	4	4	4
Pariaman	5	5	5	5	5
SUMATERA BARAT (Provinsi)	4	4	4	4	4

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2021

Sesuai dengan tabel 1.4 terlihat rata-rata tanggungan keluarga pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dari tahun 2017-2021 tidak jauh berbeda, dimana dari data tanggungan terbanyak lebih kurang 5 orang sedangkan jika diamati dari rata-rata tanggungan keseluruhan dapat di simpulkan setiap keluarga memiliki tanggungan sebanyak 4 orang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendidikan, Pendapatan**

Perkapita dan Rata-rata Tanggungan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dibahas berdasarkan latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.
2. Apakah Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.
3. Apakah Rata-rata tanggungan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.
4. Apakah pendidikan, Pendapatan perkapita dan Rata-rata tanggungan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Pendapatan perkapita terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Rata-rata tanggungan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.

4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan Rata-rata tanggungan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat tentang tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.
3. Sebagai bahan referensi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat.